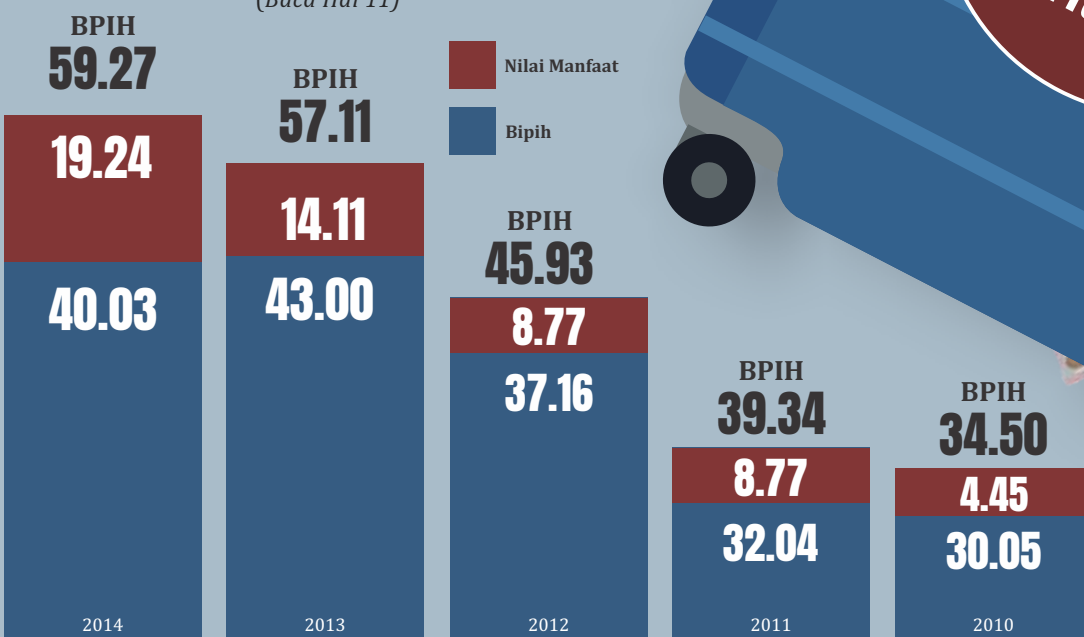




# RIUH SOAL BIAYA HAJI JOKOWI: BELUM FINAL SUDAH RAMAI

Riuh rendah terkait biaya haji yang naik hingga 75 persen mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan bila besaran biaya haji yang diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum bersifat final. Oleh karenanya, Jokowi heran mengapa isu tersebut diributkan publik. Dikatakannya bakal ada kajian dan kalkulasi yang semuanya tentu saja sesuai prosedur. Kalangan DPR RI pun mengatakan ongkos ke tanah suci sangat berpeluang turun di bawah Rp 69,2 juta. Namun bak 'buah simalakama', kala kekhawatiran jamaah diredam, muncul kewaspadaan baru dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Mereka mengeluarkan peringatan, bila tidak ada kenaikan biaya haji dan perubahan komposisi manfaat yang diberikan, maka nilai manfaat akan habis 4 tahun lagi. Artinya 'subsidi' akan menggerus pokok dana kelolaan semua setoran awal calon haji yang belum berangkat. Apalagi di tahun 2027 akan ada dua kali penyelenggaraan ibadah haji. Jangan sampai saat jamaah mau berangkat, dana simpanan di BPKH tak mencukupi. Naudzubillahimindzalik.

(Baca Hal 11)



**Parlement (Hal.3)**  
Soal RUU Kesehatan,  
Menkes Sentil  
Kewenangan Izin  
Praktik

**DATA PERKEMBANGAN  
BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI (2010 - 2022)**

# Gubernur Khofifah: Pariwisata Sektor Potensial, Mesin Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Sumber PAD

**TRENGGALEK** - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengotimalkan potensi wisata yang ada di sepanjang garis pantainya. Menurutnya, letak Trenggalek yang berada di kawasan Pantai Selatan Jawa memiliki banyak sekali destinasi wisata pantai memukau. Khofifah meyakini, eksotisme alam yang dimiliki Trenggalek menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara jika dikelola dengan baik.

"Jika objek wisata dikelola dengan baik, infrastruktur penunjang pariwisata diperbaiki dan ditambah, kemudian amenities dan event, ditambah promosi besar-besaran saya yakin jumlah wisatawan yang datang ke Trenggalek pun akan meningkat pesat," ungkap Khofifah saat berkunjung ke Pantai Mutiara, di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Senin (23/1/2023).

Khofifah datang didampingi Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin usai meresmikan Hunian Tetap Kampung Indah Permai di Desa Sumurup dan Jembatan Mukus serta Jembatan Bendoroto Bangun, Trenggalek.

Khofifah menyebut, sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan asli daerah, dan menciptakan lapangan kerja.

"Saya yakin jika pariwisata berkembang, maka sektor lainnya pun ikut terdongkrak, mulai dari hotel atau



homestay, transportasi, kuliner, oleh-oleh, dan masih banyak lagi. Hilirnya tentu saja kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, kawasan Pantai Selatan Jawa yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi dengan panjang rutenya lebih dari 1.500 kilometer tersohor dengan pemandangannya yang indah. Pantainya, dikenal dengan ombaknya yang tinggi, namun punya eksotisme alam yang tidak ada duanya.

"Gunakan media sosial untuk mempromosikan potensi wisatanya. Kontennya, reviu keindahan alamnya, kuliner, mitosnya, keramahan masyarakatnya, sampai testimoni



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berdiskusi dengan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin terkait potensi wisata kabupaten tersebut saat berkunjung ke Pantai Mutiara, di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Senin (23/1/2023).

pengunjung. Bikin wisatawan penasaran untuk datang," tuturnya.

"Mari kita promosikan keindahan pantai-pantai selatan Jatim agar semakin dikenal. Tidak hanya di ranah domestik, melainkan juga kancah internasional," tambahnya.

Khofifah menuturkan, selain destinasi pantai, Trenggalek juga memiliki desa wisata yang tidak kalah bagusnya. Salah satunya, adalah Desa wisata Pandean yang berada di Kecamatan Dongko. Desa ini bahkan masuk ke dalam 50 besar desa terbaik pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sendiri, lanjut dia, menargetkan hingga tahun 2023

sebanyak seratus desa wisata terbentuk. Saat ini terdapat 70 desa wisata yang sudah dibina dan dikembangkan melalui program pendampingan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Desa Tasikmadu Wignyo Handoyo mengatakan bahwa pengelolaan Desa Wisata Pantai Mutiara dilakukan secara mandiri oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Wignyo menyampaikan rasa terimakasihnya atas kunjungan Gubernur Khofifah di Pantai Mutiara. "Semoga dengan kehadiran Ibu Gubernur bisa memperkenalkan wisata Pantai Mutiara kepada masyarakat luas," pungkasnya. (ADV)

## Sidang Pleidoi, Sambo Curhat Dituduh Bandar Judi hingga Selingkuh

**JAKARTA** - Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo mencurahkan isi hatinya kepada majelis hakim usai dituntut hukuman pidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023), Sambo mengaku banyak tuduhan yang diarahkan kepadanya usai terjerat perkara tersebut.

Mulanya, Sambo mengaku pleidoinya yang berjudul 'Setitik Harapan Dalam Ruang Sesak Pengadilan' hendak diberi judul 'Pembelaan yang Sia-sia'. Hal itu lantaran Sambo merasa frustrasi dan putus asa di tengah hinaan, caci-maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari berbagai pihak terhadap dirinya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan kasus pembunuhan Brigadir J.

Ia merasa berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada dirinya sebelum adanya putusan dari majelis hakim. Sambo merasa tak ada

ruang sedikitpun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong katapun tidak pantas untuk didengar apa lagi dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti dirinya.

Sambo menuturkan selama 28 tahun bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan, ia belum pernah menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang dialaminya saat ini.

"Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa," kata Sambo.

Tak hanya itu, Sambo juga merasa media framing dan produksi hoax terhadap dirinya dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan perkara tersebut, termasuk tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan.

Menurutnya, tekanan itu telah mempengaruhi persepsi publik terhadap dirinya dan mempengaruhi hasil keputusan pemeriksaan perkara pembunuhan Brigadir J yang mengikuti kemauan semua pihak, termasuk orang-orang yang mencari popularitas dari perkara yang tengah ia hadapi.

"Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita," kata Sambo.

Sambo menyebut berbagai tuduhan yang telah disebar luaskan di media dan masyarakat membuat dirinya seolah-olah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Sambo pun membeberkan berbagai tuduhan yang diberikan publik kepadanya. Tuduhan itu antara lain Sambo disebut sebagai bandar judi dan narkoba, selingkuh dengan banyak wanita, hingga melakukan LGBT.

"Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap Yosua sejak dari Magelang, begitu juga tuduhan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah siri dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Kwat Ma'ruf, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua," ujar Sambo.

Sambo menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja disebarluaskan di masyarakat agar dirinya dijatuhi hukuman berat atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

"Kesemuanya adalah tidak benar dan telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengar dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya," ucap Sambo. (wid,rs/ldya)



# Soal RUU Kesehatan, Menkes Sentil Kewenangan Izin Praktik

## TUNTUTAN IDI SOAL RUU KESEHATAN

- Menolak Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan Omnibus Law) dan medesak pimpinan DPR RI agar mengeluarkan RUU tersebut dari Prolegnas Prioritas karena pembahasannya dinilai sangat tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan yang berlaku. Naskah akademik mengenai RUU ini tidak ada yang dibicarakan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melihat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bertujuan untuk kebaikan bangsa.

- Menolak liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan masyarakat selaku konsumen kesehatan.

- Menolak pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran-pesan organisasi profesi yang selama ini telah berbakti bagi negara dalam menjaga mutu dan profesionalisme anggota profesi yang semata-mata demi keselamatan dan kepentingan pasien.

## PASAL YANG DINILAI MENGANCAM BPJS

Dalam draft RUU Kesehatan, organ BPJS yaitu Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) di UU BPJS direvisi dengan signifikan.

- Pasal 7 ayat (2)** RUU Kesehatan menyatakan BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan untuk BPJS Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, Pasal 13 huruf (k) tentang tugas BPJS, RUU ini mewajibkan BPJS melaksanakan penugasan dari kementerian.

- Pasal 13 huruf (l)**, BPJS berkewajiban melaporkan secara berkala enam bulan sekali kepada Presiden melalui menteri terkait, dengan tembusan kepada DJSN. Dan mengacu pada Pasal 34 ayat (2) usulan pemberhentian Direksi BPJS dilakukan oleh menteri kepada presiden. Pada UU BPJS, direksi dan Dewas BPJS bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan direksi maupun Dewas tidak bisa melaksanakan penugasan dari menteri. BPJS berkewajiban melaporkan secara berkala enam bulan sekali langsung kepada Presiden, tanpa melalui menteri, dengan tembusan kepada DJSN.

- Pasal 21 ayat (3) dan (4)**, komposisi Dewas BPJS dari unsur Pemerintah menjadi 4 orang, 1 orang unsur Pekerja, 1 orang unsur Pemberi Kerja, dan 1 orang unsur tokoh masyarakat. Pada UU BPJS, unsur Pemerintahan hanya 2 orang, unsur pekerja 2 orang, unsur pemberi kerja 2 orang, dan 1 orang unsur tokoh masyarakat. Penambahan jumlah Dewas dari unsur Pemerintahan tersebut, disertai kontrol kuat menteri terhadap Dewas.

- Pasal 21 ayat (9)** menyatakan Menteri dapat meminta laporan anggota Dewas dari unsur pemerintahan, dan mengusulkan penggantian (recall) terhadap anggota Dewas dari unsur pemerintahan kepada Presiden.

- Pasal 28** mengamatkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) BPJS dilakukan oleh menteri (Kesehatan atau Ketenagakerjaan) bersama Menteri Keuangan atas persetujuan presiden. Menteri Kesehatan menjadi ketua Pansel BPJS Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan di UU BPJS, presiden membentuk pansel, dan ketua pansel bukan menteri.



**JAKARTA-** Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku kerap menerima draft terkait RUU Kesehatan, tetapi hingga kini belum diketahui draft mana yang kemudian terkonfirmasi. Pasalnya, isi dari draft yang diterima seringkali berbeda.

P i h a k n y a , m e m a s t i k a n mendukung RUU Kesehatan Omnibus Law selama menguntungkan masyarakat, utamanya dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Salah satu yang paling disoroti Menkes adalah minimnya jumlah dokter dan dokter spesialis.

Persoalannya, saat ini, Menkes merasa pemerintah tidak leluasa dalam wewenang pemenuhan dokter dan dokter spesialis. Terlebih, dalam izin praktik dokter yang kerap ramai dikaitkan dengan konflik internal nakes. "The government have the right to govern, jadi pemerintah harus bisa memerintah, sekarang kita nggak lakukan apa-apa, kalau sekarang kita kekurangan produksi dokter memang kita bisa mengatur? Nggak bisa. Kita kurang distribusi dokter memang kita bisa ngatur? Nggak bisa juga," tutur Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/2023).

"Kalau misal ada rame, soal kompetensi atau antara penerbitan izin untuk praktik, kita bisa ngatur? Tidak juga. Jadi saya bingung kalau misalnya ada asosiasi radiologi kemudian ribut, kemudian kita suruh ngatur, ya kita nggak punya wewengannya," lanjut Menkes.

Polemik minimnya jumlah tenaga kesehatan juga terlihat di fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah. Jumlah dokter spesialis di RSUD seharusnya minimal tujuh orang. Faktanya, tidak semua RSUD memenuhi ketentuan tersebut.

Menkes, sebagai orang dengan latar belakang dari profesi non medis memastikan dirinya tak memiliki kepentingan apapun. Ia menyebut hanya ingin melakukan perubahan demi perbaikan layanan kesehatan semasa sisa jabatannya kurang dari dua tahun ini.

"Jadi saya rasa itu seharusnya ada di pemerintah, bukannya kita ingin menguasai, tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengatur kemudian kejadiannya seperti ini, nggak bisa ngatur distribusi, produksi dokter, nggak bisa ngatur spesialis harusnya berapa, kompetensi-nya harusnya tidak rebutan seperti apa, kita akan kesulitan sendiri untuk memastikan bahwa layanan kesehatan di masyarakat itu cukup."

"Jadi saya ngerasa tiap kali ada responsibility dari kita, ya kita harus ada ability to response. Jadi mohon, saya juga nggak datang dari dunia medis, nggak ada kepentingannya, akan selesai dalam satu tahun 10 bulan lagi jadi pasti ini akan diwariskan ke generasi sesudah saya. Saya hanya ingin memastikan bahwa siapapun nanti yang menggantikan



(Ilustrasi) Tenaga kesehatan turun ke jalan menolak RUU Kesehatan yang dinilai banyak pasal tidak berpihak pada masyarakat. (Foto-dok)

saya, benar-benar bisa menjalankan amanahnya, memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Indonesia," pungkask dia.

Selain itu, Kemenkes juga berharap revisi UU Kesehatan dapat menguatkan kemandirian obat-obatan di Indonesia. "Obat-obatan juga masih tergantung impor, jadi kita ingin lebih banyak di dalam negeri dan juga yang berbasis herbal. Kalau Korea terkenal ginseng, kenapa kita nggak bisa dengan jamu, lengkuas, dan lain-lain," tandasnya.

Saat ini, proses legislasi Omnibus Law Bidang Kesehatan tersebut masih dalam penyusunan Naskah Akademi di Baleg DPR. Ada sejumlah masalah yang diharapkan dapat teratasi revisi UU ini, terutama mengenai persyaratan praktik tenaga kesehatan yang dianggap terlalu rumit. Di satu sisi, Omnibus Law Bidang Kesehatan juga mendapat penolakan dari sejumlah pihak, seperti Ikatan Dokter Indonesia.

Penolakan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law karena dianggap akan merugikan tenaga kesehatan dan menuntut DPR mengeluarkannya dari Prolegnas Prioritas 2023. Di antaranya terkait wacana penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi dan Surat Tanda Registrasi (STR). STR juga diwacanakan dapat berlaku seumur hidup, bukan 5 tahun sekali seperti saat ini.

### Akui Regulasi Terlalu Panjang

Sementara, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari PDIP Sondang Tampubolon menegaskan alasan pentingnya revisi UU Kesehatan yang saat ini dibahas. Terutama mengenai persyaratan praktik tenaga kesehatan yang dianggap terlalu rumit.

Sondang juga menyoroti perihal panjangnya tahapan regulasi tenaga kesehatan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin praktik di Indonesia. "Untuk seorang dokter bisa berpraktik di Indonesia, pertama dia harus lulus S.Ked, kemudian harus melaksanakan koas selama 2 tahun," tuturnya di akun Instagram, dikutip Selasa (24/1/2023).

Berdasarkan penuturannya yang memang concern dengan isu kesehatan ini, prosesnya setelah itu, calon tenaga kesehatan ini harus melakukan PTT, serta melakukan internship. "Kemudian apakah mereka sudah bisa praktik? Ternyata belum. Mereka harus mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah atau pemerintah daerah setempat," ujar Sondang.

Rekomendasi ini kemudian akan digunakan untuk mendaftarkan STR, yang digunakan untuk mendapat surat izin praktik sebelum akhirnya bisa menjadi tenaga praktik yang legal. STR yang telah didaftarkan pun harus diperbaharui setiap lima tahun dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan SIP.

Menurut Sondang, langkah-langkah ini terlalu panjang, terlebih adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki Indonesia saat ini. Dia menyarankan untuk mempersingkat dan menyederhanakan tahapan regulasi ini agar sumber daya yang tersedia dapat segera terjun ke lapangan.

"Itu langkahnya terlalu panjang. Kenapa tidak bisa dipersingkat atau dipersimpel, disederhanakan? Untuk mendapatkan jadi SIP, ya sudah SIP dan STR itu digabungkan menjadi satu. Bagaimana kita bisa menyederhanakan regulasi-regulasi, begitu," tukasnya. (wid,rls, kum,ist/dya)



# Pemerintah Gelontorkan Rp 26,89 Triliun untuk Cadangan Pangan

**JAKARTA** - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan akan mengurus 11 komoditas cadangan pangan pemerintah (CPP). Pemerintah pun telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP tersebut dengan total Rp 26,89 triliun.

"Ini estimasi satu tahun membutuhkan kurang lebih sekitar Rp 26 triliun," ujar Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/1/2023).

Ia menuturkan masalah pangan seringkali bukan hanya soal supply dan demand, tetapi siapa pihak yang menguasai pasokan. Misalnya, kata dia, stok gula di Tanah Air sangat besar tetapi dikuasai 100 persen oleh perusahaan swasta, sehingga pemerintah tidak bisa mengendalikan harga dan stoknya. Alhasil, perlu ada cadangan pangan pemerintah.

Adapun tiga komoditas pangan diurus oleh Perum Bulog, yakni beras, jagung, dan kedelai. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk beras, yaitu Rp 10,5 triliun untuk pengadaan sebanyak 1,2 juta. Sedangkan untuk jagung sebesar Rp 1,47 triliun untuk pengadaan 350 ribu ton, dan kedelai sebesar Rp 2,69 triliun untuk pengadaan 250 ribu ton. Sehingga total anggaran yang akan digelontorkan untuk pengadaan CPP di gudang Bulog sebesar Rp 14,7 triliun.

Sedangkan ID FOOD bakal mengurus delapan komoditas, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi. Total anggaran yang bakal dialokasikan untuk seluruh CPP komoditas tersebut adalah Rp 12,17 triliun.

Untuk mendukung program ini, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, Holding Pangan sebagai penyelenggara program ini mendapatkan fasilitas pinjaman dengan subsidi bunga.

Besaran subsidi bunga yang diberikan sebesar 4,75 persen. "Jadi jika kami lakukan nego dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) bunganya 9 persen, maka kami cuma cukup bayar 4,25 persen agar kami bisa lebih leluasa melakukan program stabilisasi ini," ujarnya.

Kendati demikian, Holding Pangan hingga kini masih menunggu beberapa aturan lainnya yang akan dituangkan dalam Peraturan Badan Pangan atau Perbadan untuk beberapa komoditas. Tetapi ia memastikan aturan tersebut segera rampung mengingat tenggat waktu sudah dekat. Selain itu, Holding Pangan juga tengah menunggu surat



(Ilustrasi) Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP dengan total Rp 26,89 triliun. (Foto: Antara)

penugasan dari Kementerian BUMN.

Dia berharap pada pertengahan Februari 2023, ID FOOD dan Bulog akan resmi menjalankan program penyerapan CPP ini. Khususnya, untuk mengantisipasi persiapan stok dan stabilisasi harga ketika Ramadhan pada Maret nanti. Terlebih Bank Mandiri sudah memberikan pinjaman sebesar Rp 700 miliar kepada ID FOOD.

Adapun penyaluran CPP seperti yang termaktub dalam Pasal 5 dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Penyaluran CPP termasuk untuk mengantisipasi, memitigasi krisis pangan, memberikan bantuan berupa pangan dan kerja sama internasional, serta memberi bantuan pangan luar negeri, dan/atau keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pengalokasian anggaran di sektor pertanian dan perkebunan. Pasalnya, Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin menilai anggaran pada dua sektor tersebut sangat besar

namun hasilnya tak signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

"Kami menilai perlu dilakukan evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan

kontribusi yang signifikan pada produksi nasional," ujarnya dalam

rapat dengar pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementan di Gedung DPR RI, Senayan pada Selasa (24/1/2023).

Sudin menuturkan pada subsektor pertanian, anggaran di direktorat peternakan dari tahun ke tahun termasuk yang cukup besar. Namun ia menilai kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging dalam negeri masih jauh dari harapan. Harus dievaluasi pencapaian realisasinya, kata dia, khususnya komoditas daging sapi.

Ia meminta Kementan mencatat berapa persen kontribusinya terhadap kebutuhan nasional.

Kemudian Komisi IV meminta Kementan mengevaluasi realisasi anggaran pada sektor perkebunan. Sudin mengatakan sektor ini

sebelumnya diharapkan bisa menjadi andalan dalam meraih devisa. Tetapi pada kenyataannya, menurut dia, surplus komoditas ekspor pertanian adalah hasil kinerja pihak swasta.

"Ini kalau tidak ada pengusaha perkebunan sawit, tidak mungkin meningkat tajam. Karena faktanya pencapaian nilai ekspor dikarenakan pihak swasta. Tidak sepenuhnya dari kinerja Kementerian Pertanian," ujarnya.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPR mempertimbangkan agar anggaran untuk Kementan yang tidak memberikan pencapaian nasional yang signifikan untuk dialihkan ke kegiatan yang lain. Misalnya, ia mencatat pada beberapa tahun ini, anggaran untuk perkebunan kopi dan kelapa cukup besar. Karena itu Kementan diminta mencermati masalah kinerjanya di lapangan.

Kemudian pada subsektor pertanian pangan. Menurutnya, realisasi anggarannya juga perlu dicermati kembali, khususnya untuk komoditas kedelai. Ia mengatakan hasil produksi di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) tidak realistis dengan data luas areal tanam.

Di sisi lain, Komisi IV DPR juga menyoroti soal anggaran pengadaan alat dan mesin pertanian. Anggaran tersebut diberikan pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Menurutnya, anggaran untuk program tersebut begitu besar sehingga harus dicermati lantaran dinilai masih kecil kontribusinya pada pertanian nasional. (lut,tempo/dya)



"Kami menilai perlu dilakukan evaluasi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan pada produksi nasional,"

**SUDIN**  
Ketua Komisi IV DPR RI  
dari Fraksi PDI

# Hakim Vonis Para Petinggi ACT 3 Tahun Penjara



Ibnu Khajar (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

**JAKARTA** - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Eks Senior Vice President Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Hariyana Hermain dan eks Presiden Yayasan Aksi ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar dengan hukuman pidana penjara 3 tahun penjara dalam perkara penyelewengan dana bantuan Boeing kepada ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT 610.

Selain itu juga menjatuhkan vonis pada mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Ketua Majelis Hakim, Haryadi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023), menyatakan pada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primer.

Kasus ini berawal ketika The Boeing Company menyediakan dana santunan untuk 189 penumpang dan kru pesawat yang meninggal kepada ahli waris.

Boeing menyediakan dana Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) dan Boeing Community Investment Fund (BCIF) masing-masing USD 25 juta. Ahli waris korban menerima dana BFAF USD 25 juta secara langsung. Sementara dana Rp 25 juta BCIF diperuntukkan sebagai bantuan

finansial komunitas lokal. Namun BCIF tidak diterima langsung oleh ahli waris, melainkan dikelola pihak ketiga atau badan amal.

Boeing tidak menunjuk langsung badan amal yang akan mengelola dana ini, tetapi hanya menetapkan syarat penerima dana. Perusahaan pun mendelegasikan kewenangan ini kepada Adminsitrator Mr. Feinberg dan Ms. Biros untuk menentukan program individual, proyek atau badan amal yang akan didanai BCIF. Akan tetapi badan amal yang akan mengelola ditunjuk oleh ahli waris.

“Secara aktif pihak Yayasan ACT menghubungi keluarga korban dan mengatakan telah mendapat amanah (ditunjuk dari Boeing sebagai pengelola dana sosial BCIF,” bunyi dakwaan seperti dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Selasa (15/11/2022).

Pada hal, Boeing tidak menetapkan badan amal atau pihak ketiga yang akan mengelola dana tersebut. ACT kemudin meminta keluarga korban mengisi dan menandatangani formulir pengajuan yang dikirim ke Boeing agar dana BCIF bisa dicairkan kepada ACT. Dalam email tersebut, ACT meminta dana BCIF sebesar USD 144.500 per ahli waris.

Pada Oktober 2018, pembangunan fasilitas sosial yang direkomendasikan

oleh 68 ahli waris kepada ACT mulai dilakukan. Namun pengerjaan proyek tersebut mangkrak. Sampai saat ini ACT juga belum memberikan progres pekerjaan kepada Boeing terkait implementasi pengelolaan dana sosial.

“Namun berdasarkan klausul Boeing, Yayasan ACT wajib melaporkan hasil pekerjaannya,” kata jaksa dalam dakwaannya.

Proyek yang dikelola oleh ACT terkait dengan dana sosial Boeing berjumlah 70 proyek dari 68 ahli waris, di mana ada satu ahli waris yang mengajukan dua proyek.

Pada pelaksanaannya, penyaluran dana Boeing tersebut tak melibatkan para ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek pembangunan dana BCIF.

Pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap juga tidak memberitahukan kepada pihak ahli waris terhadap dana BCIF yang diterima dari pihak Boeing. Diduga pengurus Yayasan ACT melakukan penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya untuk kepentingan pribadi berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi, operasional perusahaan serta kegiatan lain di luar program Boeing.

Tersangka Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana diduga telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117,98 miliar untuk kegiatan di luar implementasi Boeing tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air Pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari perusahaan Boeing sendiri.

Sementara itu, Ibnu Khajar, juga divonis bersalah dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT 610. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ketua

Majelis Hakim Hariyadi saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Hakim menyatakan terdakwa Ibnu Khajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primair.

“Perbuatan terdakwa merusakkan masyarakat luas, khususnya penerima manfaat dan ahli waris korban pesawat Boeing,” kata hakim.

Sebelumnya, majelis hakim telah memvonis pendiri dan mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ahyudin dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dalam perkara.

Kuasa hukum Ibnu Khajar mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak terhadap vonis tersebut.

Sebelumnya, Mantan pendiri sekaligus presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, mengaku tidak bersalah dan memohon majelis hakim agar ia dibebaskan dari tuntutan empat tahun penjara dalam kasus penyelewengan dana hibah korban Lion Air JT 610.

Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Ahyudin, Irfan Junaedi, saat membacakan nota pembelaan atau pledoi kliennya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2023). Dalam kasus ini, Ahyudin didakwa karena menyelewengkan dana hibah perusahaan Boeing yang diperuntukkan kepada ahli waris sebesar Rp 117 miliar.

“Kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan menolak dakwaan dan/atau tuntutan jaksa penuntut umum secara keseluruhan,” kata Irfan.

Kuasa hukum memohon majelis hakim agar menyatakan Ahyudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Irfan juga memohon agar kliennya dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan kliennya lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsoepcolging).

Lebih lanjut, Irfan juga memohon majelis hakim memulihkan hak Ahyudin dalam kedudukan, harkat, dan martabat, serta dilepaskan dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. (lut,tempo/dya)

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun,”

**HARIYADI**  
Ketua Majelis Hakim





**Gaya Santai Ibu Muda ala**

# EMMA ROBERTS

*Foto - Foto : Istimewa*



**MENJADI** ibu muda dengan banyak aktivitas terkadang membuatmu jarang memerhatikan penampilan. Tapi itu tidak berlaku untuk aktris Hollywood, Emma Roberts.

Saat ini, ia sedang disibukkan sebagai seorang ibu dari anak perempuan yang berusia 2 tahun. Meskipun sebagai seorang ibu, Emma tetap tampil stylish dan kasual dalam setiap kali membagikan potret dirinya.

Meskipun sudah memiliki anak yang telah berusia 2 tahun, Emma Roberts tetapi terlihat imut dan santai saat sedang membaca buku.

Dalam salah satu foto yang ia bagikan di Instagram miliknya, terlihat ia mengenakan overall jeans panjang yang dipadukan dengan kaus lengan panjang.

Ia pun melengkapi penampilannya dengan mengenakan sepatu sneakers berwarna putih dengan sunglasses berframe warna senada. Tampilan ini semakin membuatnya tampak imut dan saat ketika sedang membaca buku.

Bagi Anda yang senang mengenakan motif tartan pada gayamu, kamu bisa nih tiru salah satu gaya Emma Roberts ini.

Ia terlihat mengenakan knitted cardigan berwarna navy yang dikancing bagian atasnya dan dipadukan dengan celanan tartan warna senada.

Untuk melengkapi gaya simple dan okenya ini, ia mengenakan sepatu loafers berwarna hitam yang dipadukan dengan kaus kaki bermotif kotak biru. Cocok banget dikenakan saat berangkat ke kampus.

Penyuka warna hitam wajib coba gaya Emma Roberts yang satu ini. Dalam salah satu foto yang dibagikan, Emma Roberts terlihat mengenakan knitted top berwarna hitam yang dipadukan dengan celana cutbray berwarna hitam pula.

Ia juga melengkapi gayanya dengan mengenakan oxford sandal berwarna hitam, sling bag warna senada, serta sunglasses yang diselipkan di antara kepala dan rambutnya. Tampilan ini memberikan kesan elegan dan santai untuk berjalan-jalan.

Emma Roberts juga selalu berusaha untuk menghabiskan waktunya bersama putri kecilnya.

Pada salah satu momen, ia membagikan potret dirinya saat sedang bermain dengan anaknya.

Terlihat bahwa Emma mengenakan kemeja putih berlempang puff yang dipadukan dengan jeans. Untuk memudahkan gerakannya saat bermain dengan putrinya, Emma mengenakan flat shoes berwarna silver dengan sunglasses berwarna merah.

Di tengah teriknya sekitar, Emma Roberts tetap ingin tampil anggun nan menawan dengan balutan dress warna cerah. Ia terlihat mengenakan stripped mini dress berwarna putih hijau.

Ia terlihat mengenakan sandal platform berwarna putih yang dipadukan dengan handbag warna hijau toska.

Tak lupa, ia menghidupkan gaya anggun nan menawannya dengan mengenakan sunglasses bermotif hitam pekat.

## PROFIL

Emma Rose Roberts yang lahir pada tanggal 10 Februari 1991 dikenal sebagai seorang aktris, penyanyi-penulis lagu, dan desainer. Dia adalah putri aktor Eric Roberts, serta keponakan aktris Julia Roberts dan Lisa Roberts Gillan.

Namun ia merasa tidak harus terbebani dengan karier dan popularitas bibinya, Julia Roberts. Emma mengaku punya cara memetakan jalur kariernya sendiri.

"Saya tidak pernah bercita-cita menjadi dia (Julia). Saya sangat mencintainya, saya mencintai pekerjaannya, tetapi saya hanya melakukan hal saya sendiri," kata Emma, seperti dikutip dari People.

Aktris 30 tahun itu menjadi bintang Nickelodeon dengan Unfabulous, sekaligus bermain di film ramah keluarga seperti Aquamarine tahun 2016, Nancy Drew 2007, dan dan Hotel for Dogs 2009.

Emma mengaku bersemangat untuk mengambil peran yang berbeda dan lebih gelap ketika pencipta American Horror Story dan Screaming Queens, Ryan Murphy memberinya kesempatan.

"Bagian favorit saya adalah yang tidak diharapkan orang, ketika Ryan Murphy mendapat saya di American Horror Story, misalnya. Orang-orang melihat saya sebagai gadis remaja yang baik dan saya tidak bisa menjadi lebih tua, peran yang lebih tegang pada saat itu," kata dia.

Dilansir dari laman Fox News, Roberts mulai bergelut di kancah Hollywood pada usia yang relatif muda. Dia mulai bekerja pada usia 9 tahun ketika berperan bersama Penelope Cruz dan Johnny Depp di Blow.

Dalam momen wawancara lainnya, Roberts membuka tentang pengalamannya dengan paparazzi yang terobsesi dengan selebriti di jalanan saat dia mengharapkan anak pertamanya.

"Cara saya diikuti dan diperlakukan ketika saya hamil itu menjengkelkan," katanya tentang paparazzi itu (berbagai sumber)

Emma  
Roberts



# PENDERITA

# HIPERTENSI

# HARUS SETOP

# KONSUMSI GARAM

**PENYAKIT** hipertensi identik sebagai penyakit yang menyerang orang berusia lanjut karena risiko hipertensi semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Meski begitu, dalam kenyataannya tidak sedikit kasus hipertensi terjadi pada kalangan usia muda.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan RI terdapat sebesar 8,7 persen penderita hipertensi usia 15-24 tahun. Sementara Riskesdas 2018 prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1 persen.

Dari data tersebut angka kejadian tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,1 persen, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2 persen. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun sebesar 31,6 persen, umur 45-54 tahun 45,3 persen, umur 55-64 tahun 55,2 persen.

Ali Baswedan, Sp.PD-KEMD, Dokter Spesialis pada Klinik Endokrin di RSA UGM, menyitir pendapat Kemenkes yang menyatakan bahwa seseorang dinyatakan hipertensi kalau dalam waktu dua kali pemeriksaan dalam rentang satu minggu tensi di atas 140 sehingga jika pengukuran sudah 141 maka sudah masuk kategori hipertensi.

"Dari definisi Kemenkes seperti itu dalam dua kali pemeriksaan dalam seminggu jika tekanan darah 140 ke atas untuk batas atas dan 90 ke atas untuk batas bawah maka yang bersangkutan sudah dinyatakan

hipertensi," ujarnya dikutip dari laman resmi UGM.

Ali Baswedan menuturkan hipertensi adalah suatu penyakit yang dalam keadaan tertentu tidak bergejala. Tidak ada gejala tetapi begitu diukur tensi tiba-tiba tinggi, namun ada juga yang ditandai dengan gejala sakit kepala, merasa tidak nyaman dan lain-lain.

Tetapi sebagian besar hipertensi, tidak bergejala atau silent, dan itu yang berbahaya. Oleh karena itu, pemeriksaan secara periodik bisa tiga bulan sekali sangat penting untuk dilakukan agar setiap individu mampu mendeteksi sejak awal apakah dirinya ada hipertensi atau tidak.

"Terutama bagi orang-orang yang memiliki keturunan hipertensi, misal dari bapak, kakek neneknya, paman nya, dan memiliki kecenderungan seperti itu maka sebaiknya secara periodik periksa," katanya.

Ali Baswedan menjelaskan secara umum hipertensi dibagi ke dalam 2 kelompok, pertama hipertensi esensial atau hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya yang besarannya mencapai 90 persen. Kedua hipertensi sekunder atau hipertensi yang bisa dilacak penyebabnya yang besarannya mencapai 10 persen.

Menurut Ali hipertensi sekunder ini masih memiliki harapan untuk diperbaiki. Semisal karena kelainan ginjal maka begitu ginjal diobati maka hipertensi akibat ini bisa sembuh, demikian pula hipertensi akibat

kelainan hormon berlebih maka jika hormon diobati maka hipertensi akibat gangguan inipun bisa kembali.

"Artinya yang 10 persen ini merupakan tipe hipertensi yang bisa diperbaiki, sedang yang 90 persen tidak lagi bisa," ucapnya.

Terkait banyaknya kasus hipertensi dan menyerang usia muda akhir-akhir ini, Ali Baswedan menuturkan situasi dan kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk itu.

Masyarakat saat ini dengan mudah mendapatkan sarana periksa untuk mengukur tekanan darah. Orang tidak perlu harus ke dokter atau pusat layanan kesehatan dengan antri tetapi cukup di apotik atau banyak tempat lainnya.

Sumber garam ini, disebutnya, sebagai salah pemicu utama hipertensi. Padahal, hal ini berdekatan dengan kehidupan nyata manusia. Ia terbiasa berada di dapur berikut dengan yang lainnya seperti penyedap rasa atau MSG (micin), berbagai bahan lain yang mengandung pengawet kecap, saos, sambal sachet, camilan, makanan ringan dan lain-lain.

Semua itu merupakan sumber garam yang tentu kandungan garamnya sangat berlebihan. Kenapa garam itu berbahaya bagi penderita hipertensi? Karena garam mengandung Natrium dan Natrium ini memiliki sifat-sifat jahat untuk tubuh.

"Dengan mengonsumsi garam secara terus menerus maka natrium akan masuk sel, pada saat masuk sel maka cairan juga akan masuk kedalam semua sehingga bisa overload

(kelebihan) cairan dan kelebihan cairan ini membuat jantung memompa lebih kuat sehingga menaikkan tensi," paparnya.

Menurutnya, sebanyak 60 persen mereka yang memiliki keturunan darah tinggi sensitif terhadap garam. Sedang 40 persen lainnya tidak sensitif.

Rilis WHO pernah mengimbau untuk penderita hipertensi sebaiknya mengurangi konsumsi garam kurang dari 5 gram. Imbauan ini tentunya sulit untuk diartikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi adalah memperbaiki life style atau gaya hidup. Memperbanyak gerak, mengurangi konsumsi garam, alkohol, tembakau dan rutin teratur makan sayur dan buah.

Menurut Ali sayur dan buah sesungguhnya sumber nabati untuk natrium. Untuk itu tidak makan garam dapur sebenarnya tidak masalah karena permasalahan hanya di lidah yang terasa anep sebab sudah terbiasa asin. (Bisnis)





# Twitter Blue Berbayar Rilis di Android

**TWITTER** Blue akhirnya dirilis untuk pengguna Android sehari setelah paket langganan ini diumumkan melalui aplikasi Twitter untuk iOS dan di web.

Dikutip dari berbagai sumber, biaya langganan pengguna yang ingin membeli paket Twitter Blue melalui Android harus membayar US\$11 per bulan atau setara Rp166.000.

Harga tersebut sama seperti di iOS. Namun, lebih tinggi dari penawaran US\$8 atau setara Rp125.000 bagi mereka yang berlangganan Twitter Blue melalui browser web.

Perbedaan harga ini disebut-sebut kemungkinan lantaran Twitter dan Elon Musk tidak ingin membayar komisi untuk pembelian di Apple App Store dan Google Play Store, sehingga pengguna Android dan iOS harus membayar lebih mahal.

Untuk saat ini, paket Twitter Blue telah tersedia di seluruh platform di enam negara yakni AS, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Jepang.

Twitter Blue adalah versi premium untuk platform media sosial Twitter yang memiliki banyak fitur unggulan yang tidak bisa digunakan oleh pengguna biasa.

Pelanggan yang berlangganan Twitter Blue, saat ini mendapatkan fitur seperti tanda verifikasi biru, unggahan video yang lebih lama, dan peringkat prioritas dalam balasan percakapan.

Fitur lain juga termasuk pembaca utas, kemampuan untuk mengedit tweet dan ikon serta tema khusus.

Bukan itu saja, Twitter juga meluncurkan paket langganan tahunan seharga US\$84 atau senilai Rp1,2 juta per tahun pada hari ini. Hanya saja, paket langganan satu tahun ini baru tersedia untuk pendaftaran via web.

Skema berlangganan satu tahun ini dinilai lebih hemat untuk menikmati

layanan Twitter Blue.

Namun, mengingat bagaimana perusahaan telah mendorong dan menarik fitur, tidak ada jaminan bahwa rangkaian manfaat saat ini akan tersedia selama satu tahun.

## Apa itu Twitter Blue

Twitter Blue adalah layanan langganan bulanan yang ditawarkan oleh Twitter untuk pengguna yang ingin mendapatkan akses eksklusif ke fitur premium Twitter.

Melansir dari The Verge, layanan Twitter berlangganan ini pertama kali diluncurkan pada Juni 2021 di Kanada dan Australia di iOS, dan November lalu telah diluncurkan di AS serta Selandia Baru untuk Android dan versi Web.

Dengan Twitter Blue, maka pengguna bisa mendapatkan sejumlah

fitur menarik seperti tombol undo, mendapat berita tanpa iklan, serta adanya fitur membaca utas secara lebih nyaman.

Fitur-fitur yang lain adalah adanya bookmark folder, navigasi halaman yang paling sering dibaca, memilih tema, mengunggah video lebih panjang, serta menyematkan percakapan.

Dari semua fitur, fitur adanya tombol undo mungkin adalah yang paling ditunggu.

Sayangnya, fitur undo di sini bukanlah alat untuk mengedit postingan Twitter yang terlanjur dikirim. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat pratinjau dan melakukan perubahan sebelum postingan benar-benar dikirim.

Nantinya pengguna akan diberi pilihan untuk mengirim langsung

tweetnya atau kembali mengedit sebelum waktu 60 detik.

Fitur Twitter Blue yang mungkin juga diunggulkan, yakni nantinya akan muncul keterangan "Bebas Iklan dengan Twitter Blue" di bawah judul artikel yang dibagikan di Twitter.

Hal itu berarti artikel yang dibagikan tersebut adalah artikel yang dibuat oleh penyedia konten yang bekerjasama dengan Twitter Blue untuk tidak memasang iklan.

Twitter Blue dibangun dari akuisisi Twitter terhadap Scroll, platform yang menyediakan fitur serupa.

Kini telah ada lebih dari 300 situs berita yang berbasis di AS yang berpartisipasi dalam program Twitter Blue seperti The Washington Post, The Atlantic, BuzzFeed, The Hollywood Reporter, The Verge, dan sebagainya (berbagai sumber)



# SARAN PAKAR OBESITAS JIKA BERAT BADAN ANDA TAK KUNJUNG TURUN

**MENURUNKAN** berat badan selalu menjadi perjuangan dan ini mungkin sulit bagi sebagian mereka termasuk yang terlanjur mengalami obesitas.

Lalu apa yang bisa dilakukan jika berat badan tak juga kunjung turun hingga mencapai normal?

Tubuh manusia adalah mesin yang sangat efisien. Tubuh mengerahkan berbagai mekanisme saat merasa terancam.

Oleh karena itu, saat seseorang mengurangi asupan kalori, tubuhnya merasakan penurunan berat badan itu, dan menganggapnya sebagai ancaman.

Akibatnya, tubuh mengurangi laju metabolisme dan membakar lebih sedikit energi atau dengan kata lain, itu memperlambat laju penurunan berat badan, demikian seperti diungkap ScienceAlert.

Menurut penelitian, stagnansi penurunan berat badan terjadi antara tiga dan enam bulan dan biasanya berakhir dengan penambahan berat badan. Namun, ini tidak berarti bahwa seseorang menyerah begitu saja.

Sebenarnya, ada beberapa cara untuk mengelola masalah stagnansi penurunan berat badan selama diet, menurut Ketua Charles Perkins Center

Research Program di University of Sydney Nick Fuller seperti disiarkan Medical Daily beberapa waktu lalu.

Pertama, pikirkan kembali tujuan penurunan berat badan. Fuller mengatakan aspek terpenting dari penurunan berat badan adalah mengetahui definisi berat badan yang sehat.

Menurut dia, banyak orang menggunakan indeks massa tubuh (IMT) untuk menetapkan tujuan penurunan berat badan mereka, tetapi angka pada timbangan, dan skor yang dihasilkan saat seseorang memasukkan berat dan tinggi badan ke dalam kalkulator IMT, tidak masuk akal.

"Itu tidak menceritakan keseluruhan kisah tentang apa artinya menjadi berat badan yang sehat," tutur dia.

Ini karena IMT tidak memperhitungkan persentase lemak tubuh dan distribusi lemak tubuh.

Olahraga teratur menyebabkan penambahan otot. Rasio otot-ke-lemak yang dihasilkan akan berdampak pada pengukuran berat badan, karena otot lebih berat daripada lemak tubuh. Juga, distribusi lemak dapat berubah karena rencana penurunan berat badan.

Olahraga dapat mentransfer jumlah lemak tidak sehat yang

tersimpan di sekitar pinggang lebih dekat ke organ, yang bagus untuk mengurangi risiko penyakit.

"Berusahalah dengan lingkaran pinggang sekitar 80 cm untuk wanita dan sekitar 90-94 cm untuk pria," saran Fuller.

Cara lainnya yakni, jangan melewatkan waktu makan. Puasa intermitten atau melewatkan sarapan dikatakan sebagai kebobrohan besar.

Jumlah makanan dan waktu makan memainkan peran penting.

“

Studi penelitian terkontrol menunjukkan waktu sarapan yakni ketika tubuh Anda paling baik menggunakan kalori yang Anda masukkan – sebenarnya, ini membakar kalori dari makanan dua setengah kali lebih efisien di pagi hari dibandingkan dengan malam,”

**NICK FULLER**

Ketua Charles Perkins Center  
Research Program di  
University of Sydney

“Studi penelitian terkontrol menunjukkan waktu sarapan yakni ketika tubuh Anda paling baik menggunakan kalori yang Anda masukkan – sebenarnya, ini membakar kalori dari makanan dua setengah kali lebih efisien di pagi hari dibandingkan dengan malam,” jelas Fuller.

Selanjutnya, tinjau asupan makanan yakni harus sepadan dengan berat badan, karena berat badan yang lebih sedikit berarti tubuh membutuhkan lebih sedikit bahan bakar untuk menjalani hari.

Secara umum, seseorang perlu mengonsumsi 10 persen lebih sedikit kalori saat menurunkan berat badan hingga 10 persen, hanya untuk mempertahankan berat badan baru.

"Tapi ini tidak berarti kekurangan atau kelaparan. Sebaliknya, Anda harus berfokus pada makanan padat nutrisi dan menjaga camilan," demikian saran Fuller (Ant)





## Riuh Soal Biaya Haji .... (dari hal 1)

**PRESIDEN** Joko Widodo (Jokowi) merespons kegaduhan setelah rencana kenaikan biaya haji 2023 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Jokowi menegaskan kenaikan biaya haji masih dalam kajian. "Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final, belum final sudah ramai," kata Jokowi usai meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Jokowi lantas memastikan, besaran dana haji yang diusulkan pemerintah akan dikalkulasi kembali sebelum keputusan final diambil. "Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi," ujar mantan Wali Kota Solo tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag mengusulkan kenaikan biaya jemaah haji tahun 2023 dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 98.893.909. Nilainya naik sekitar Rp 514.000 dibanding tahun 2022. Rinciannya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau 70 persen. Sementara itu, 30 persen lainnya adalah subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 29.700.175. Dengan komposisi tersebut, BPIH yang harus dibayar calon jemaah naik sebesar Rp 30 juta/jemaah dibanding tahun lalu. Pada tahun 2022, BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji hanya sebesar Rp 39,8 juta.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, nilai tersebut diambil dalam rangka keseimbangan dan keadilan antara beban jemaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya. Yaqut mengungkapkan, pemerintah harus mencari formula bagaimana cara untuk menjaga prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. "Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian," ujar Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan tim panitia kerja (Panja) Komisi VIII DPR bakal meninjau komponen biaya pendukung jemaah di Arab Saudi. Hal ini menindaklanjuti usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta yang disampaikan oleh Kemenag.

Yandri awalnya ingin meluruskan narasi di media sosial yang disebut Indonesia menaikkan biaya haji, sementara Saudi menurunkan biaya sampai 30 persen. Politikus PAN ini menekankan bahwa biaya haji yang turun di Arab Saudi hanya untuk Masyair.

"Saya dengar di TikTok itu katanya kenapa Indonesia naikkan ongkos haji, sementara Saudi menurunkan 30%. Ini menurut saya kalau tidak diluruskan khawatir gaduh. Jadi yang diturunkan oleh Saudi itu Masyair," kata Yandri di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Yandri menyebut biaya Masyair

sebelum Covid-19 senilai 1.000 Riyal. Saat Yandri menjadi Ketua Komisi VIII, biaya Masyair menyentuh angka 5.600 Riyal. "Sekarang diturunkan jadi 4.600, betul turun, tapi jika dibandingkan sebelum Covid tinggi juga selisihnya hampir 3.600 untuk biaya Masyair," tutur Yandri.

"Jadi jangan sampai masyarakat diprovokasi seolah-olah Saudi itu menurunkan semua harga. Ini penting diluruskan karena sangat viral banyak sekali konfirmasi ke saya, 'apakah benar Saudi menurunkan ke semua komponen?' tidak, yang diturunkan hanya Masyair," lanjutnya.

Yandri menyebut di awal bulan Februari Panja akan meninjau langsung ke Arab Saudi. Tujuan kunjungan untuk memastikan biaya komponen lain, seperti hotel, catering dan lainnya yang dibebankan kepada jemaah.

"Panja dalam waktu dekat akan ke Saudi, di awal bulan 2, untuk memastikan perhotelan, catering dan sebagainya itu. Sehingga pulang dari sana kita akan memastikan berapa yang layak untuk dibebankan ke jemaah dan berapa nilai manfaat yang akan digunakan untuk melaksanakan haji tahun ini," kata dia.

Di sisi lain, Yandri meluruskan kenaikan biaya haji diusulkan naik atas pertimbangan kondisi BPKH. Haji tahun ini memang terpaksa naik karena nilai manfaat atau subsidi yang diberikan BPKH kepada jemaah haji pada 2022 tahun lalu cukup besar.

Sebab, pemerintah Saudi mendadak menaikkan biaya Masyair (layanan di tiga lokasi puncak haji, yaitu Arafah, Mina, dan Muzdalifah) saat kloter pertama haji hendak berangkat. "Kita harus hitung agar uang BPKH tetap sehat untuk ibadah haji di masa datang. Karena kalau nilai manfaat tahun ini terlalu besar juga kemungkinan akan ganggu di masa depan," lanjut Yandri.

Lebih lanjut, ia berharap masyarakat tak salah paham terkait kabar pemerintah Saudi menurunkan dana haji. Apalagi dana haji yang diturunkan hanya mencakup biaya Masyair.

"Sekarang lagi beredar TikTok pemelintiran berita. Katanya, kenapa Indonesia naikkan ongkos haji, padahal biaya turun 30%? Ini Masyair, perlu diluruskan. Dulu biaya Masyair sebelum COVID 1.800 Riyal, lalu naik

pas COVID jadi 5.656 Riyal, terus turun. Biayanya sekarang tetap lebih tinggi dari sebelum COVID," terangnya.

"Jadi bukan Saudi menurunkan semua harga. Bukan semua komponen haji, tidak. Hotel, catering, Panja akan ke Saudi di awal bulan dua (Februari) untuk pastikan berapa yang layak dibebankan ke jemaah dan nilai manfaat," pungkask dia.

### Jemaah Bisa Tunda Berangkat

Usul kenaikan biaya haji mencapai Rp 69,1 juta, mengancam para jemaah yang sudah dapat giliran berangkat tapi gagal karena tak ada biaya untuk pelunasan. Setiap jemaah haji sudah menyeter Rp 25 juta untuk dapat nomor antrean. Mereka akan membayar sisanya saat akan berangkat. Kalau usul Rp 69,1 juta disetujui DPR, maka jemaah harus bayar sisanya sekitar Rp 44 juta.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyebut bila ada calon jemaah haji yang tidak mampu membayar, maka keberangkatannya bisa ditunda. "Mereka otomatis akan menunda keberangkatannya. Tapi yang paling penting kebijakannya itu ada di Kementerian Agama dan Komisi VIII [DPR]," kata Fadlul dalam media gathering di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023).

"Jadi kami dari sisi BPKH berusaha memaksimalkan nilai manfaat agar kemampuan dari calon jemaah haji sesuai dengan apa yang dibayarkan dengan tahun keberangkatannya," imbuhnya.

Fadlul juga menyebut kenaikan biaya haji atau Bipih (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) itu untuk menjaga keuangan haji agar tidak tergerus di tahun-tahun depan. "Kalau itu [nilai manfaat] kita distribusikan untuk orang yang berangkat tiap tahun, itu akan habis. Sebelum 2027 sudah habis. Artinya akan menggerus pokok dana kelolaan semua setoran awal calon jemaah haji yang belum berangkat," kata Fadlul.

BPKH menyebut bila nilai manfaat yang diberikan kepada calon jemaah haji tetap seperti tahun lalu, maka dana yang dikelola BPKH tidak akan mencukupi untuk biaya haji tahun mendatang. "Yang disampaikan Kemenag sangat masuk akal sekali dan sudah memperhitungkan segala macam risiko dan utamanya bukan

risiko secara sosial, tapi justru sebagai mitigasi risiko," katanya.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrh Kemenag Hilman Latief menjelaskan Kemenag akan memberikan waktu bagi calon jemaah haji melunasi biaya haji. "Insyaallah mereka mudah-mudahan sudah menyiapkan [biaya] itu. Tapi bahwa kita akan memberikan waktu pelunasan yang cukup. Kalau dalam undang-undang sepertinya sudah diatur, 30 hari," ujarnya.

Hilman menjelaskan akan memberikan kelonggaran waktu yang lebih bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya haji selama 30 hari. Dalam jadwal Kemenag, pemberangkatan pertama jemaah ke Arab Saudi adalah 24 Mei. "Tentu itu [batal berangkat] yang tidak diinginkan dan bahwa jemaah itu harusnya sudah bisa menghitung sejak tahun lalu. Jadi tahun lalu itu separuh [jemaah haji] mereka tahu akan terbawa [berangkat haji] sebagian tahun 2023 dan sudah siap.

Terpisah, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Jaja Jaelani, menyebut tahun 2027 akan ada dua kali penyelenggaraan ibadah haji. Jangan sampai saat haji digelar tahun 2027, dana simpanan di BPKH tidak bisa keberangkatan jemaah ke Tanah Suci karena besarnya nilai manfaat yang diterima jemaah sejak 2022.

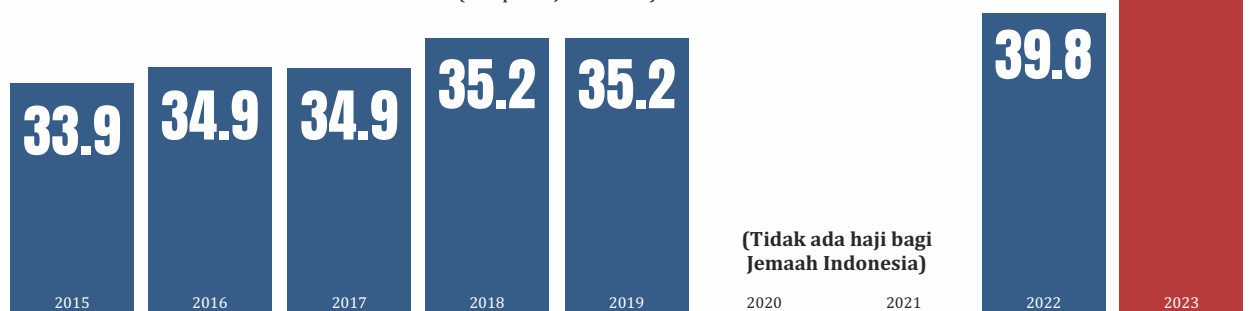
"Haji itu biayanya Rp 98 juta. Dari dana tabungan dia dengan bagi hasil, masih belum ketemu. Makanya ada nilai manfaat meski 30 persen karena antisipasi tahun 2027 haji 2 kali," tutur Jaja kepada kumparan.

Dia berharap ada titik temu berapa biaya haji yang perlu dibayarkan calon jemaah pada tahun ini. Usulan Kemenag itu akan dibahas di Panja Haji Komisi VIII DPR. "Mudah-mudahan bersama Komisi VIII dan pemerintah bisa ada titik temu," tuturnya.

Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) agar seorang jemaah bisa berangkat ke Tanah Suci terdiri dari: biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan sepenuhnya oleh jemaah dan nilai manfaat (NM) yang dibayarkan oleh pemerintah dari dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). (wid,rls,ist/dya)

## BIAYA HAJI DARI TAHUN KE TAHUN

(Data per 20 Januari 2023)



69.1  
Usulan  
Kemenag

# Tersangkut Gratifikasi Rp 32 M, Eks Panglima GAM Ditangkap KPK



Mantan Panglima GAM Izzil Azhar yang ditangkap KPK setelah menjadi buron terkait kasus gratifikasi sejak tahun 2018. (Foto-istimewa)

**JAKARTA** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Panglima GAM Izzil Azhar di Aceh yang merupakan buronan sejak tahun 2018. Dia tersangkut dugaan gratifikasi Rp 32 miliar terkait proyek Dermaga Sabang yang melibatkan mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

KPK dikatakan sudah memantau keberadaan Izzil Azhar sejak akhir 2022. "Benar, Selasa, 24 Januari 2023 dengan bantuan tim dari Polda Aceh, tim berhasil menemukan DPO KPK atas nama Izzil Azhar. DPO sejak 30 November 2018 dimaksud ditemukan dan diamankan di sekitar Banda Aceh," ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (24/1/2023). "Sebelumnya koordinasi antara tim KPK dan Polda Aceh sudah dilakukan sejak Desember 2022," imbuhnya.

Kasus bermula ketika mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Izzil merupakan salah satu orang kepercayaan Irwandi Yusuf. Izzil dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian di kasus gratifikasi proyek Dermaga Sabang.

Namun Izzil, yang berstatus saksi, berulang kali mangkir dari panggilan KPK. Kemudian pada 26 Desember 2018, KPK resmi memasukkan Izzil ke daftar pencarian orang. Izzil Azhar diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Dermaga Sabang bersama Irwandi Yusuf. Keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perkara ini berawal dari penyidikan KPK pada korupsi

pembangunan Dermaga yang dibiayai APBN 2006-2011 itu pada 2013. Nilai total proyek itu Rp 793 miliar. KPK menduga ada kerugian keuangan negara Rp 313 miliar karena adanya penyimpangan dalam proyek itu. Dalam perjalanannya, ada sejumlah orang yang sudah divonis yaitu Heru Sulaksono (mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara), Ramadhani Ismy (mantan PPK), Ruslan Abdul Gani (mantan kepala BPKS sekaligus KPA), Teuku Syaiful Ahmad (unfit to trial/dilimpahkan ke Kejagung untuk digugat perdata TUN), serta 2 korporasi yaitu PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati.

Pernah dalam persidangan pada Senin, 25 Februari 2019, Irwandi meminta majelis hakim menghadirkan Izzil Azhar yang disebut sebagai mantan Panglima GAM kawasan Sabang. Izzil disebut akan menyerahkan diri jika mendapatkan perintah Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017, Muzakir Manaf.

"Izzil Azhar saksi mahkota, agar saya tidak difitnah, tolong dihadirkan. Saya sudah kasih cara dan dapat informasi dari teman GAM, Izzil Azhar mau menyerahkan diri kalau diperintah atasannya bernama Muzakir Manaf, mantan Wagub Aceh," ucap Irwandi kala itu. Irwandi Yusuf telah divonis 7 tahun penjara. Diketahui, saat ini dia telah bebas bersyarat.

Dalam sidang, hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni

Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Tak hanya suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Namun, majelis hakim menilai, dakwaan ketiga JPU KPK tidak terbukti.

Dakwaan tersebut, yakni penerimaan gratifikasi senilai Rp32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Irwandi menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izzil Azhar.

## KPK Dilaporkan Dewas

Di sisi lain, KPK sedang menghadapi laporan di dewan pengawas (Dewas). Direktur Penyidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dilaporkan ke Dewas atas dugaan melawan perintah atasan. Pelaporan ini diduga terkait dengan penanganan laporan penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris membenarkan soal adanya laporan tersebut. "Ya, benar," kata Syamsudin Haris dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Meski demikian Haris enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan mengatakan aduan tersebut saat ini sedang dipelajari oleh Dewas

KPK. "Sedang dipelajari oleh Dewas," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan saat ini pihaknya masih fokus untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. "Sebagai profesionalitas kerja-kerja pemberantasan korupsi, KPK masih terus melakukan berbagai upaya tindak lanjut dari laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Formula E," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Kasus Formula E itu masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK. "KPK memastikan untuk tetap fokus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum serta tugas dan kewenangannya berdasar undang-undang," ucapnya.

Ali mengatakan dalam mengusut suatu kasus, KPK juga mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan Pasal 6 huruf e UU KPK bahwa KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. (wid,ant,kum,rls/dya)

## DERETAN KEPALA DAERAH TERKENA OTT KPK

**27-28 April 2022:** Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin, Terkena Operasi Tangkap Tangan/OTT Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dan Jadi Tersangka Kasus Suap

**Penangkapan Bupati Ade Yasin** Menambah Panjang Daftar Kepala Daerah yang Terkena OTT atau Berurusan Hukum dengan KPK

### OTT KPK SEBELUMNYA

#### 2022

**18/1/2022:** Bupati Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana Perangin Angin

**13/1/2022:** Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud

**5/1/2022:** Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi

#### 2021

- 6 Kepala Daerah
- 3 Kepala Daerah
- 9 Kepala Daerah
- 100 Kepala Daerah Terkena OTT/ Berurusan Hukum dengan KPK

